

# PEMBERDAYAAN SEKTOR EKONOMI INFORMAL : SUATU TINJAUAN EMPIRIS

**Ade Parlaungan Nasution**

*Dosen Tetap Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi  
Universitas Riau Kepulauan Batam*

## **Abstrak**

*Permasalahan sektor Ekonomi informal yang terjadi seakan-akan menjadi suatu permasalahan rutin di masyarakat, seperti perputaran siklus, tidak pernah berhenti meskipun secara teoritis sektor ini bukanlah suatu fenomena yang baru. Sektor informal ada di sekeliling kita sejak manusia ada di muka bumi. Karena sektor ini muncul sejak manusia ada di muka bumi, maka mereka melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara menciptakan lapangan kerja sendiri atau self employed. Akan tetapi, sektor informal selalu mendapatkan predikat sebagai “penghambat” pembangunan. Predikat tersebut selalu saja menuai permasalahan yang kian hari kian sempit ruang gerakannya. Akibatnya, sektor informal semakin sulit untuk mengembangkan usahanya demi memenuhi kebutuhan hidup.*

*Namun pada kenyataannya Sektor informal mengisi setidaknya dua pertiga dari perekonomian nasional yang menyebabkan mesin perekonomian menjadi jalan yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan meingkatkan pertumbuhan ekonomi dan perlu dicatat bahwa struktur dari ekonomi informal ini merupakan bagian strategis di dalam sistem ekonomi Indonesia*

*Kata Kunci : ekonomi informal, pemberdayaan, kesejahteraan*

## **Pendahuluan**

Keberadaan sektor ekonomi informal sangat jelas dan magnitude-nya sangat besar terhadap perekonomian nasional. Pembahasan terhadap sektor atau ekonomi informal menyangkut sebagian besar dari pelaku ekonomi. Oleh karena itu, eksistensinya tidak dapat dinafikan sehingga segala permasalahannya otomatis menjadi tanggung jawab negara dalam kiprahnya melalui kebijakan ekonomi.

Sektor informal mengisi setidaknya dua pertiga dari perekonomian nasional. Struktur ini merupakan bagian strategis di dalam sistem, tetapi sekaligus merupakan masalah yang rumit. Beberapa masalah yang timbul antara lain :

- a. Keterbatasan modal dan akses terhadap pasar merupakan kendala utama yang bersifat akut dan belum bisa tertanggulangi secara sempurna,
- b. Belum adanya upaya advokasi yang tumbuh dari dalam sektor informal itu sendiri. Para pekerja yang bekerja di sektor informal selalu disibukkan dan terkungkung oleh usaha yang mereka geluti. Mereka selama 24 jam memikirkan bagaimana cara mengembangkan usahanya, menyelamatkan usahanya dari “ancaman” pemerintah yang ingin menggusur, dll.
- c. Pelaku sektor informal belum memiliki manajemen usaha yang bisa membuat mereka bekerja secara efisien dan memiliki daya tawar yang kuat
- d. Terhambatnya proses pemberdayaan sektor informal bukan saja diakibatkan oleh terbatasnya anggaran tetapi juga adanya kebijakan pemerintah (pusat/daerah) yang

memang cenderung kurang menghendaki terjadinya transformasi informal menuju formal yang maju dan modern.

- e. Sektor informal yang dipandang sebagai perusak kota, walaupun sebenarnya tidak semuanya memiliki sisi negatif dari tumbuhnya sektor informal ini. Sektor informal belum diakui sebagai sektor yang memiliki potensi besar dalam pembangunan ekonomi Indonesia.
- f. Banyak kalangan pejabat dan golongan elit yang memandang sektor informal terutama pedagang kaki lima sebagai gangguan yang dapat membuat tatanan kota menjadi tidak rapi dan kotor seperti adanya kemacetan lalu lintas, bermunculan banyak penyakit akibat membuang sampah sembarangan.

Dari data ILO tahun 2015 Jumlah pekerja informal pada tahun 2014 mencapai 71 juta orang atau 64 persen dari seluruh penduduk yang bekerja. Angka tersebut meningkat dari waktu ke waktu karena penyerapan tenaga kerja di sektor formal tidak cukup signifikan. Dibandingkan dengan tahun lalu, angka tersebut lebih tinggi (tahun 2004 sebesar 63,2 persen).

Jumlah angkatan kerja Tahun 2014 mencapai tidak kurang dari 125.3 juta orang. Tetapi, yang bekerja hanya sekitar 118.2 juta orang. Setiap enam bulan jumlah penganggur baru bertambah sebesar 600.000 orang.

### **Konsep Sektor Informal**

Konsep sektor informal yang digunakan dalam tulisan ini mengikuti konsep yang digunakan Oleh Mazumdar dan Hidayat. Seperti penulis oleh Hidayat, pengertian informal disini adalah dalam artian ekonomis ; dan jangan dikacaukan dengan konsep seperti *informal leader* dan pendidikan informal. Dikatakan juga bahwa yang informal ini tidak termasuk usaha ilegal seperti penyelundupan. Masih mengikuti konsep Hidayat konsep sektor informal ini tidak terbatas pada daerah kota tetapi juga mencakup pedesaan. Dalam operasionalisasinya, Hidayat memasukkan industri pengolahan, bangunan, jasa, perdagangan, dan angkutan ke dalam sektor informal di kota : sedangkan untuk desa dia menambahkan, dari kelima subsektor tadi, subsektor pertambangan, khususnya pasir dan batu.

Ciri utama sektor informal tiadanya bantuan atau proteksi ekonomi. Bantuan ekonomi dapat timbul, misalnya, karena adanya perserikatan buruh, pemberian kredit dengan bunga yang relatif murah, perlindungan dan perawatan bekerja, hak cipta. Tidak adanya bantuan, di sini, dalam arti *accessability* dan bukan sekedar kemudahan (fasilitas), tapi tidak ada *access* maka usaha dalam sektor informal.

Ciri sektor informal yang juga sering dijumpai adalah bervariasinya jam kerja. Hal ini disebabkan karena tiadanya perjanjian kerja untuk jangka waktu yang lama dan atau banyaknya pekerja mandiri di sektor informal ini. Di sektor informal biasanya perputaran pekerjaan (*job turnover*) juga tinggi. Masuk ke sektor ini amat mudah, karena usaha di sektor ini tidak membutuhkan modal (uang dan fisik ) yang besar, tidak meminta keterampilan yang tinggi, dapat menggunakan bahan setempat, dan permintaan yang selalu ada akan barang / jasa yang dihasilkan sektor informal.

Adalah menarik bahwa sifat sektor informal yang tidak membutuhkan modal besar, yang dapat menggunakan bahan setempat dan tidak membutuhkan keterampilan tinggi ini relatif tidak sensitif terhadap gejolak perekonomian internasional. Perekonomian di sektor informal ini relatif dapat lebih mandiri. karena pertumbuhan di sektor informal secara langsung memperbaiki kesejahteraan golongan ekonomi lemah, maka kemajuan dalam sektor informal,

sekaligus menaikkan pendapatan nasional, walau tidak banyak, dan memperbaiki distribusi pendapatan.

Bila di sektor formal kurangnya permintaan dapat menyebabkan kelesuan perekonomian, di sektor informal permintaan akan selalu kuat, sebab, barang dan jasa yang dihasilkan di sektor informal ini merupakan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat sehari-hari. Apa yang dihasilkan sektor informal biasanya merupakan barang dan jasa yang mereka butuhkan sehari-hari.

Selain itu, hasil di sektor informal juga di konsumsi oleh mereka yang bekerja di sektor formal. Para pekerja di sektor formal dapat, umpamanya, pergi ke tempat kerja dengan, antara lain, naik becak. Ketika haus, membeli es pinggir jalan; ketika lapar, membeli gado-gado lontong di warung. Pulang kerja, membeli surat kabar dari penjaja koran, dan tidak lupa membeli rambutan dari penjual buah-buahan. Sampai di rumah dia menyuruh pembantunya menolong membersihkan halaman. Di hari libur, dia dapat memanfaatkan jasa pengumpul barang bekas untuk menjual koran bekasnya.

Apakah kenaikan gaji pegawai negeri akan memperkuat permintaan di sektor informal? Perlu kita lihat dahulu bagaimana para pegawai negeri menggunakan tambahan pendapatan mereka. Harga yang cenderung naik akan menurunkan (atau dapat pula meniadakan) tambahan daya beli mereka. Walaupun begitu, adanya *money illusion* dapat menyebabkan para pegawai negeri tetap membesar pengeluaran mereka. Bila terjadi kenaikan pengeluaran, entah karena daya beli mereka bertambah atau karena *money illusion*, kami menduga bahwa kenaikan pengeluaran itu akan diarahkan pada barang dan jasa yang relatif tidak mahal harganya dan barang dan jasa tersebut dapat dihasilkan dari sektor informal.

Hal ini disebabkan karena pada umumnya pegawai negeri adalah golongan masyarakat yang pendapatan rendah. Naiknya harga BBM dan pajak pertambahan nilai akan mengurangi kemungkinan mereka meningkatkan (kalau toh ada) permintaan akan barang yang di hasilkan di sektor formal. Oleh sebab itu, mungkin pengeluaran mereka akan diarahkan pada barang dan jasa yang murah ataupun yang dihasilkan sektor informal.

### **Kondisi Sektor Informal Di Indonesia**

Data sektor informal ini beragam tergantung proksi apa yang digunakan untuk mengukur sektor informal tersebut. Kebanyakan data yang digunakan bersifat kasus khusus dan terpancar di berbagai daerah. Usaha yang lebih terpadu diperlukan agar diperoleh suatu gambaran yang lebih baik tentang kondisi sektor informal di Indonesia.

Namun, walau tak banyak, telah pula dilakukan beberapa usaha untuk memberikan gambaran sektor informal secara menyeluruh / nasional. Widarti<sup>3</sup>, misalnya, menggunakan status pekerjaan untuk pengelompokan sektor formal dan sektor informal. Mereka yang bekerja dengan status bekerja sendiri (tanpa bantuan orang lain), bekerja dengan bantuan buruh tidak tetap, bekerja dengan bantuan pekerja keluarga, dan mereka yang bekerja sebagai pekerja keluarga dimasukkan kedalam sektor informal. Lainnya, yaitu mereka yang bekerja sebagai buruh / karyawan dan mereka yang bekerja dengan buruh karyawan tetap, dimasukkan ke sektor formal.

Widarti mendapatkan bahwa dari seluruh pekerja sektor informal sebagian besar (sekitar 70 persen berada di sektor S, yaitu sektor perdagangan, keuangan, dan jasa-jasa hal ini ditemuinya baik dengan data sensus penduduk 1980, survei penduduk antar sensus 1976, maupun survei tenaga kerja nasional 1976. Persentase ini lebih besar di kalangan perempuan (sekitar 80 persen daripada kalangan laki-laki (sekitar 70 persen).

Melihat sektor S saja, Widarti menunjukkan bahwa pekerja sektor informal sebagian besar terdapat di sektor perdagangan (sekitar 60 persen). Persentase terbesar berikutnya (

sekitar 30 persen ) terdapat di sektor jasa-jasa.pola ini ditemuinya pula untuk ketiga data tersebut. Pola ini juga dapat dijumpai baik untuk pekerja laki- laki maupun pekerja perempuan.

Hal ini berarti laki- laki dan perempuan tidak mempunyai perbedaan pola pemilihan antar sektor informal, walaupun perempuan lebih cenderung bekerja di sektor informal daripada laki- laki. Terbatas pada daerah kota, secara kasar Widarti menyimpulkan bahwa persentase pekerja yang bekerja di sektor informal telah meningkat dari tahun 1971 hingga 1980, peningkatan ini terjadi di semua sektor, kecuali sektor pertanian.

Menarik untuk memikirkan lebih jauh tidak meningkatnya persentase pekerja di sektor informal pertanian, padahal persentase ini meningkat untuk semua sektor lainnya. Mungkin, ini berarti bahwa pekerjaan di sektor pertanian telah makin formal sifatnya, sehingga sulit bagi yang tidak bermodal, yang berketerampilan rendah, untuk berpartisipasi dalam sektor pertanian. Hal ini amat mungkin terjadi karena datanya dibatasi pada daerah perkotaan saja. Atau, suatu kemungkinan lain, adalah sektor pertanian menjadi kurang menarik untuk mereka yang bermodal kecil dan berketerampilan rendah, relatif terhadap daya tarik sektor informal lainnya seperti perdagangan jasa- jasa.

Widarti juga memperlihatkan bahwa persentase pekerja di sektor informal lebih besar di desa dari pada di kota. Di desa, 74,1 persen pekerja laki-laki bekerja di sektor informal dan untuk perempuan angkanya 80,4 persen. Padahal, di kota hanya 39,1 persen pekerja laki- laki yang bekerja di sektor informal dan yang perempuan 51,5 persen. Namun satu hal yang sama baik di desa maupun di kota, adalah bahwa persentase pekerja perempuan yang bekerja di sektor informal selalu lebih besar daripada persentase pekerja laki-laki yang bekerja disektor ini. Mungkin, ciri sektor informal yang relatif lebih flexible menyebabkan berkurangnya (atau tiadanya) konflik antara mengurus rumah tangga (yang merupakan ciri- ciri perempuan) dan usaha mencari nafkah.

Dipihak lain, dengan data sensus penduduk 1980, Hatmadji<sup>4</sup> menemukan bahwa persentase pekerja yang berstatus karyawan/ buruh cenderung meningkat dengan meningkatnya pendidikan formal. Hal ini dapat berarti bahwa meningkatnya pendidikan formal memungkinkan orang untuk lebih mudah masuk ke sektor formal. Bila kemajuan pembangunan selalu berbarengan dengan peningkatan pendidikan formal, maka majunya pembangunan tentunya akan disertai pula dengan menurunkan persentase pekerja yang bekerja disektor informal.

Namun, pemikiran ini tidak sejalan dengan apa yang diperoleh Widarti sebelum ini bahwa diperiode 1971- 1980, untuk daerah kota, persentase pekerja yang bekerja disektor informal ternyata telah membesar.

Besarnya persentase pekerja yang masuk sektor informal dan meningkatnya persentase tersebut (untuk daerah kota) mungkin merupakan pencerminan ketidakmampuan sektor formal untuk menampung pertambahan angkatan kerja padahal ini didasarkan pada suatu asumsi bahwa, kalau dapat, orang akan selalu berusaha untuk bekerja disektor formal. Hanya bila tidak ada lowongan disektor formal, maka orang lalu mencari atau menciptakan kesempatan kerja disektor informal. Dengan kata lain, sektor informal dilihat sebagai sektor sisa.

Namun, mungkin pula orang bekerja di sektor informal bukan karena mereka tak dapat bekerja di sektor formal. Mereka memilih sektor informal karena sektor ini lebih mempunyai daya tarik. Berikut ini beberapa ilustrasi tentang daya tarik sektor informal, yang kemudian diikuti dengan beberapa kasus yang menggambarkan bahwa, disamping imbalan yang replatif menarik, kerja keras pun sering dituntut dari usaha disektor informal.

## Tinjauan Empiris : Peru

Adalah Hernando de Soto, seorang ekonom Peru, Amerika Latin yang menganalisis tentang keberadaan sektor Ekonomi Informal serta permasalahannya yang dilakukannya di Peru, namun setelah bukunya terbit, *The Other Path, The Invisible Revolution in The Third World*, ternyata mayoritas seluruh Negara yang tergolong kategori dunia ketiga memberikan apresiasi dan tanggapan positif bahwa persoalan ekonomi Informal di Peru ternyata sama saja di belahan dunia ketiga termasuk Indonesia baik objek maupun subjeknya. Menariknya lagi, analisis dan kesimpulan yang dibangun dalam bukunya tidak membedakan apakah negara tersebut Negara kapitalis ataupun Negara sosialis, atau apakah Negara jajahan Spanyol ataupun jajahan Inggris atau Belanda

Menariknya lagi, tulisan de Soto yang merupakan hasil penelitian yang intens yang pada akhirnya menyadarkan pemerintah Peru bahwa tulang punggung perekonomian Peru adalah sector ekonomi Informal bukan Pengusaha besar atau MNC. dan dengan dukungan penuh dari pemerintah Peru, de Soto dan tim nya berhasil memfasilitasi pemberian status legalitas usaha terhadap 300,000 usaha ekonomi informal dan legalisasi terhadap lahan dan rumah mereka yang diikuti terbukanya akses perbankan untuk memperkuat sektor permodalan usaha melalui kredit perbankan yang jaminannya adalah sertifikat lahan dan rumah yang telah mereka terima..

Menurut de Soto, aktivitas ekonomi informal itu muncul sebagai jawaban atas mandeknya kesempatan mendapatkan legalitas hukum dan hambatan birokrasi. hal ini terjadi ketika legalitas hukum merupakan hak istimewa yang bisa diperoleh dengan akses politik dan ekonomi segelintir orang atau kelompok. Hambatan untuk memperoleh legalitas hukum dan pelayanan birokrasi ini menurut de soto adalah biaya transaksi yang sangat mahal harganya.

Padahal selama ini menurut pendapat umum mayoritas orang, ekonomi informal adalah suatu keadaan ekonomi yang terjadi sebagai dampak negatif dari sistem kapitalisme liberal sebagai akibat persaiangan usaha dan pasar bebas

Tentu saja pemikiran de Soto berbeda dengan pendapat beberapa kalangan terutama dari kelompok radikal baik sayap kiri maupun sayap kanan yang menganggap bahwa ekonomi informal muncul sebagai reaksi atas ketidakmampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pokok golongan penduduk kebanyakan yang dalam Bahasa masing-masing adalah inefisiensi versi kelompok kanan dan ketidakadilan versi kelompok kiri, namun de Soto tidak mau terjebak dalam kedua kelompok ini dan memandang secara fakta dan realitas penyebabnya adalah faktor teknis yaitu aturan hukum dan birokrasi bukan masalah ideologi.

Melalui penelitiannya di Peru sekitar tahun 1980-an, de Soto menemukan bahwa banyak kegiatan usaha di kota-kota besar di Peru tidak memiliki izin usaha. Data yang didapatkannya adalah bahwa 90 persen dari total usaha kecil, 82 persen dari total usaha transportasi di perkotaan, 60 persen dari total bisnis penangkapan ikan, serta 60 persen dari total usaha distribusi dan eceran yang ada di Peru, justru berasal dari sektor informal.

de Soto menyebutkan bahwa selama ini sektor informal yang sebagian besar adalah bercirikan usaha kecil menengah dan perorangan. Usaha ini dikategorikan ilegal karena tidak mengantongi berbagai izin, tidak formal, menempati lahan terlarang dan dengan pendapatan

yang rendah. Hal itu terjadi karena usaha-usaha mereka banyak dihambat oleh aturan birokrasi hukum dan sulitnya melakukan hubungan dengan pemerintah.

Kalaupun mereka berupaya untuk berhubungan dengan pemerintah dan mendapat pengakuan hukum serta legalitas harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Biaya menjadi formal sangat mahal. Walaupun dengan risiko dikejar-kejar oleh aparat birokrasi dan hukum dan sangat sulit untuk berkembang. Bahkan selama ini mereka seperti hantu-hantu ekonomi yang tidak tersensus dan tidak diperhitungkan oleh pemerintah walaupun keberadaan mereka ada dan dapat dirasakan.

Pemikiran De Soto terfokus pada usaha ekonomi dalam kaitannya dengan aspek hukum dan birokrasi, yang pengaruhnya sangat nyata terhadap sistem ekonomi. Namun sekali lagi de soto membuat garis hitam putih, bahwa yang dimaksud usaha ekonomi adalah usaha ekonomi yang melibatkan semua penduduk didalamnya yang saling berinteraksi dengan cara saling menguntungkan. Ini juga yang di kritik oleh de soto dengan apa yang disebutnya sebagai ekonomi merkantilisme yaitu suatu system ekonomi dimana suatu Negara dikendalikan oleh birokrasi dan peralatan hukum, yang menganggap bahwa membagi-bagi kekayaan nasional lebih penting daripada menambah besar kekayaan itu dan “membagi-bagi” menurut de Soto adalah membagikan hal monopoli atau kedudukan khusus pada kelompok tertentu yang hidup tergantung pada Negara.

Pendapat de soto diperkuat dengan menunjukkan bukti-bukti bahwa penyusunan peraturan perundangan di berbagai dunia ketiga baik yang menyangkut masalah ekonomi dan perdagangan, kerap disusun berdasarkan keinginan kelompok tertentu yang sangat memungkinkan sebagian besar orang-orang harus terlempar dan tidak bias mengikuti aturan perundangan tersebut disamping itu juga system birokrasi dibuat berlapis-lapis dan sulit, sehingga tidak memungkinkan pelaku usaha kecil dapat menembusnya sebagaimana yang terlihat pada birokrasi perizinan instansi pemerintah dan birokrasi perbankan yang kaku dan menyulitkan.

Menariknya lagi, de Soto bukan seorang pembenci pasar bebas ataupun pendukung ekonomi sentalistik, sebagaimana yang sering kita temukan dalam berbagai pemikiran ekonomi yang hanya mempunyai satu kutub, tetapi de Soto lebih mirip sebagai Anthony Giddens, yaitu yang sama-sama menawarkan “jalan tengah”. De Soto menganjurkan pemikiran untuk danya integrasi antara ekonomi formal dan informal yang dapat menciptakan kesempatan baik sektor informal maupun formal untuk berkembang menurut kaidah masing-masing, sebab hanya dengan demikian sumberdaya manusianya dapat dikembangkan baik energi maupun kreativitiasnya.

Pendapat de Soto dalam Tulisan ini saya pikir sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini, sebab pembahasan masalah sector ekonomi informal ini sudah lama di teliti, di bahas, diseminarkan bahkan sudah ada yang menjadi peraturan perundangan, namun secara umum sifatnya parsial dan terpecah-pecah dan selalu berdasarkan permasalahan yang timbul dan musiman. Sedangkan persoalan ekonomi informal terus saja bergulir pada setiap kota di Indonesia.

Persoalan-persoalan yang kita hadapi saat ini dalam sektor ekonomi informal adalah permasalahan rumah bermasalah, lahan pertanian yang tidak sah, pedagang kaki lima, industri

rumah tangga, taksi gelap, becak, dan lain-lain yang rata-rata menurut pemerintah, baik pusat maupun daerah adalah sebagai biang keladi penghambat pembangunan dan merusak keindahan kota.

Dan ironiknya, belum ada satupun solusi yang adil dan sistematis dalam penanganan masalah ekonomi informal, yang ada hanya menghancurkan dan memberangus keberadaan sektor ekonomi informal tersebut walaupun ada pemerintah daerah yang baik hati, biasanya cukup hanya membiarkannya saja namun tanpa adanya perhatian yang serius.

Padahal secara faktual, sektor ekonomi informal adalah satu-satunya sektor ekonomi yang dapat bertahan dalam serbuan krisis ekonomi Indonesia tahun 1997 dan bahkan menurut menurut sumber pemerintah, sektor ekonomi Informal adalah katup penyelamat bangsa dimana pada saat itu setor usaha besar, konglomerasi dan MNC ambruk berjatuh yang berakibat pada jatuhnya nilai rupiah dan bertambahnya pengangguran.

Dibawah pemerintahan presiden Indonesia baru, apa yang disampaikan de Soto setidaknya dapat menjadi referensi dan berharap dapat merubah paradigma dalam proses penyusunan berbagai peraturan-perundangan yang dapat mengintegrasikan berbagai kepentingan, seperti kepentingan pasar bebas dengan kepentingan nasionalisme, kepentingan pengusaha kakap dan kepentingan usaha kecil. Dan setidaknya, pendapat de Soto menunjukkan kepada kita bahwa masih ada jalan lain untuk memperbaiki ssstem ekonomi disamping jalan-jalan selama ini yang ditempuh oleh negara kita dan itu sangat mungkin.

## **Daftar Pustaka**

Brandt, Willy, Ekonomi Dunia Ketiga, Teori Pembangunan, Kemiskinan) Perpustakaan Freedom, 2000

McConnell, Campbell R., & Brue, S.L. (2005). Economics: Principles, Problems, and Policies. New York: McGraw Hill Inc.

Nasution, A. P. (2014). Kaum Saudagar Dalam Lingkaran Kekuasaan Negara. *BENING*, 1(2).

Soto, Hernando de, Ekonomi (Dunia Ketiga, Teori Pembangunan, Kemiskinan) *Perpustakaan Freedom*, 2001